

Editor :

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA



Bunga Rampai **Hukum Udara**

C.Priaardanto | Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H.

Saptandri Widiyanto, S.H., M.H., DESS., DESM. | Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA



Bunga Rampai **Hukum Udara**

Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “BUNGA RAMPAI HUKUM UDARA”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terbagi menjadi 8 bab yang membahas mengenai hukum udara, sebagai berikut :

- Bab 1. Hukum Udara Internasional: Perang Dingin dan Kasus Korean Airlines (Kal007).
- Bab 2. Kejahatan Dalam Hukum Udara Internasional: Konvensi Tokyo 1963, The Hague 1970, Montreal 1971 dan Biejing 2010.
- Bab 3. Hukum Udara Perdata Nasional: Regulasi dan Kasus-Kasusnya.
- Bab 4. Suku Cadang Palsu Pesawat Udara: (Bogus Parts Of Aircraft).
- Bab 5. Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Dengan Drone Secara Komersial di Indonesia (Legal Liability Of Carriage Using Drone For Commercial In Indonesia).
- Bab 6. Tinjau Ulang Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Bab 7. Karyawan Kontrak Dan Pegawai Tetap: Perlindungan Hukum Tenaga Penerbangan dan Lainnya.
- Bab 8. Peran Gender: Global, Regional dan Nasional.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUNGA RAMPAI HUKUM UDARA

C. Priaardanto

Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H.

Saptandri Widiyanto, S.H., M.H., DESS., DESM.

Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M

Prof. Dr. Martono, SH., LL.M., Mc.Sc., CLA



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUNGA RAMPAI HUKUM UDARA

Penulis : C. Priaardanto
Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H.
Saptandri Widiyanto, S.H., M.H., DESS., DESM.
Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M
Prof. Dr. Martono, SH., LL.M., Mc.Sc., CLA

Editor : Prof. Dr. Martono, SH., LL.M., Mc.Sc., CLA

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Ayu May Lisa

ISBN : 978-623-120-919-1

No. HKI : EC00202457767

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “BUNGA RAMPAI HUKUM UDARA”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terbagi menjadi 8 bab yang membahas 1. Hukum Udara Internasional: Perang Dingin dan Kasus Korean Airlines (Kal007). 2. Kejahatan Dalam Hukum Udara Internasional: Konvensi Tokyo 1963, The Hague 1970, Montreal 1971 dan Biejing 2010. 3. Hukum Udara Perdata Nasional: Regulasi dan Kasus-Kasusnya. 4. Suku Cadang Palsu Pesawat Udara: (Bogus Parts Of Aircraft). 5. Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Dengan Drone Secara Komersial di Indonesia (Legal Liability Of Carriage Using Drone For Commercial In Indonesia). 6. Tinjau Ulang Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 7. Karyawan Kontrak Dan Pegawai Tetap: Perlindungan Hukum Tenaga Penerbangan dan Lainnya. 8. Peran Gemder: Global, Regional dan Nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HUKUM UDARA INTERNASIONAL: PERANG DINGIN DAN KASUS KOREAN AIRLINES (KAL007).....	1
A. Pendahuluan	1
B. Perang Dingin Uni Soviet Vs Amerika Serikat	2
C. Kasus Penembakan Korean Airlines Kal007	23
D. Kesimpulan dan Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
BAB 2 KEJAHATAN DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL: KONVENSI TOKYO 1963, THE HAGUE 1970, MONTREAL 1971 DAN BIEJING 2010.....	47
A. Pendahuluan	48
B. Konvensi Tokyo 1963	63
C. Konvensi The Hague 1970	74
D. Konvensi Montreal 1971.....	85
E. Konvensi Dan Protokol Beijing 2010.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BAB 3 HUKUM UDARA PERDATA NASIONAL: REGULASI DAN KASUS-KASUSNYA	121
A. Regulasi Hukum Udara Perdata Nasional	121
B. Kecelakaan dan Ganti Kerugian.....	164
BAB 4 SUKU CADANG PALSU PESAWAT UDARA: (BOGUS PARTS OF AIRCRAFT)	227
A. Suku Cadang Palsu Dari Perpekstif Hukum.....	228
BAB 5 TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT DENGAN DRONE SECARA KOMERSIAL DI INDONESIA (LEGAL LIABILITY OF CARRIAGE USING DRONE FOR COMMERCIAL IN INDONESIA).....	234
A. Pendahuluan	234
B. Penggunaan Drone	235
C. Regulasi Transportasi dengan Drone.....	241

	D. Pengertian Tanggung Jawab	245
	E. Konsep Tanggung Jawab Hukum	249
	F. Tanggung Jawab Pengangkut dengan Drone Terhadap Pengirim dan Pihak Ketiga	262
	G. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	265
	H. Kesimpulan dan Saran.....	271
	DAFTAR PUSTAKA	273
	LAMPIRAN	278
BAB 6	TINJAU ULANG UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN	297
	A. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.....	297
	B. Majelis Profesi Penerbangan	307
	C. Diskriminasi Dalam Transportasi Udara	311
	D. Transportasi Dengan Drone	313
BAB 7	KARYAWAN KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP: PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA PENERBANGAN DAN LAINNYA.....	361
	A. Latar Belakang.....	361
	B. Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003	361
BAB 8	PERAN GEMDER: GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL	366
	A. Tinjauan Umum.....	366
	B. Gender Pada Tataran Global.....	380
	C. Gender Dalam Tataran Regional	447
	D. Gender Tataran Nasional.....	472
	TENTANG EDITOR.....	563



BUNGA RAMPAI HUKUM UDARA

C. Priaardanto

Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H.

Saptandri Widiyanto, S.H., M.H., DESS., DESM.

Elfi Amir, S.Si.T., S.E., M.M

Prof. Dr. Martono, SH., LL.M., Mc.Sc., CLA



BAB 1

HUKUM UDARA INTERNASIONAL: PERANG DINGIN DAN KASUS KOREAN AIRLINES (KAL007)

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan mengungkap kembali peristiwa bersejarah perang dingin antara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam PERANG DINGIN tersebut akan membahas kronologi blok barat vs blok timur; perang dingin, NATO dan Pakta Warsawa; persaingan Uni Soviet dan Amerika Serikat meliputi ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet, bantuan ekonomi kepada Turki, pengembangan senjata nuklir, spionase (mata-mata); pesawat udara TU-144 dan Concorde spionase (mata-mata); persaingan teknologi angkasa luar; perlombaan pesawat udara super sonik; jembatan perdamaian dunia, sedangkan KASUS KAL007 membahas penerbangan KAL007; pesawat udara pengintai berbendara sipil; ganti kerugian penumpang KAL007 termasuk dasar hukum dan jumlah ganti kerugian penumpang KAL007; hak-hak asasi manusia (HAM); tuntutan biaya operasional; pelanggaran wilayah udara; respon masyarakat internasional; pelanggaran Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944; dugaan pesawat udara pengintai RC-135; diduga pengintai Amerika Serikat; target pembunuhan anggota Kongres Amerika Serikat; respon Presiden Ronald Reago Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Martono K., Agus Promono., Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Martono K., Amad Sudiro, Hukum Udara Publik: Nasional dan Internasional. Jakarta: Penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Rajagrafindo Persada JAKARTA, 2012, hal.71.

Martono K. dkk., Regulasi dan Kasus: HUKUM PENERBANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL. Kabupaten Purbalingga: Penerbit CV EUREKA MEDIA AKSARA, 326-328.

Martono., Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa. Bandung: Penerbit Alumni, 1987, hal.202.

Richard Sypher., *Death Flight007*. Wahington: Think Publishing. 2002, pages 50-62.

ARTIKEL

Ghislaine Richard., KAL007: The Legal Fall Out, dalam Matte N.M., Ed. *Annals of Air and Space Law* (1984) Vol.XVII-194. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, 1984 page 147-162.

Martono K., *Perang Adu Pembuktian Antara KAL dengan Penumpang*, dalam Martono., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987, hal.202

DOKUMEN

ICAO Doc.7300/8 Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944.

ICAO Doc.7300/8 Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944; lihat Dempsey P.S.,Ed.,Annals of Air and Space Law (2005), Vol.XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, page 19-51

JURNAL

Annals of Air and Space Law (1984) Vol.XVII-194. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, 1984 page 147-162.

Annals of Air and Space Law (2005), Vol.XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, page 19-51.

LAIN-LAIN

31 Desember 1968: Pesawat Supersonik Pertama di Dunia dari Misi Spionase. HYPERLINK

"<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5878540/31-desember-1968-pesawat-supersonik-pertama-di-dunia-dari-misi-spionase>"<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5878540/31-desember-1968-pesawat-supersonik-pertama-di-dunia-dari-misi-spionase>. Diunduh Tanggal 2 Desember 2023
Turki dan Amerika Serikat: Sekutu yang Ambivalen

Ada Banyak Persamaan Antara Jatuhnya MH17 dan Saat Rusia Menembak Jatuh Sebuah Pesawat Sipil Pada Tahun 1983. HYPERLINK
"<https://www.businessinsider.com/ussr-shootdown-korean-air-2014-7>diunduh"<https://www.businessinsider.com/ussr-shootdown-korean-air-2014-7>diunduh Tanggal 2 Desember 2023

AS Kirim Pesawat Mata-mata Berbendera Sipil, Rudal Intai Penerbangan Komersial di Sekitar LCS
<https://www.kabarpenumpang.com/as-kirim-pesawat-mata-mata-berbendera-sipil-rudal-intai-penerbangan-komersial-di-sekitar-lcs/> diunduh Tanggal 20 Januari 2023

Bentuk-Bentuk Perang Dingin. HYPERLINK
"<https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/18/110000479/bentuk-bentuk-perang->

dingin?page=all" <https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/18/110000479/bentuk-bentuk-perang-dingin?page=all>. Diunduh Tanggal 28 Nopember 2023

China dan AS Saling Menangkap Mata-mata. HYPERLINK "<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/08/11/china-dan-as-saling-menangkap-mata-mat>" <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/08/11/china-dan-as-saling-menangkap-mata-mat> diunduh Tanggal 1 Desember 2023

Hari Ini, 44 Tahun Lalu, Korean Air Flight 902 Ditembak Jet Uni Soviet, Malah Soviet Minta Ganti Rugi Operasional. HYPERLINK "<https://www.kabarpemudaran.com/ketika-korean-air-flight-902-ditembak-jet-uni-soviet-ehh-malah-soviet-minta-ganti-rugi-operasional/>" <https://www.kabarpemudaran.com/ketika-korean-air-flight-902-ditembak-jet-uni-soviet-ehh-malah-soviet-minta-ganti-rugi-operasional/> diunduh Tanggal 1 Desember 2023

Hubungan antara Perang Dingin dengan NATO dan Pakta Warsawa. HYPERLINK "<https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/13/153000279/hubungan-antara-perang-dingin-dengan-nato-dan-pakta-warsawa?page=all>" <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/13/153000279/hubungan-antara-perang-dingin-dengan-nato-dan-pakta-warsawa?page=all> diunduh Tanggal 28 Nopember 2023

HYPERLINK "<https://adst.org/2014/10/kal-007-a-targeted-assassination/>" <https://adst.org/2014/10/kal-007-a-targeted-assassination/> diunduh Tanggal 2 Desember 2023

HYPERLINK "<https://alphahistory.com/coldwar/korean-air-disaster/>" <https://alphahistory.com/coldwar/korean-air-disaster/> diunduh Tanggal 1 Desember 2023

HYPERLINK ["https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria98_kik01.html"](https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria98_kik01.html)https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria98_kik01.html diunduh Tanggal 30 Nopember 2023

HYPERLINK ["https://www.britannica.com/topic/Central-Intelligence-Agency"](https://www.britannica.com/topic/Central-Intelligence-Agency)<https://www.britannica.com/topic/Central-Intelligence-Agency> diunduh Tanggal 1 Desember 2023

HYPERLINK ["https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/04/120000179/perkembangan-persenjataan-nuklir-pada-masa-perang-dingin?page=all"](https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/04/120000179/perkembangan-persenjataan-nuklir-pada-masa-perang-dingin?page=all)<https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/04/120000179/perkembangan-persenjataan-nuklir-pada-masa-perang-dingin?page=all>, diunduh Tanggal 1 Desember 2023

Korean Air Lines flight 007 <https://www.britannica.com/event/Korean-Air-Lines-flight-007>, diunduh Tanggal 20 Januari 2023

Menerobos Moskow: Pilot misterius yang tempuh jalur udara paling berbahaya. HYPERLINK ["https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-41065025"](https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-41065025)<https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-41065025> diunduh Tanggal 13 Nopember 2023

Mengapa Perang Dingin Identik dengan Perkembangan Ideologi?"
Tangg HYPERLINK ["https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243616/mengapa-perang-dingin-identik-dengan-perkembangan-ideologi"](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243616/mengapa-perang-dingin-identik-dengan-perkembangan-ideologi)<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243616/mengapa-perang-dingin-identik-dengan-perkembangan-ideologi> diunduh Tanggal 30 Nopember 2023

Mengenang Korean Air 007, Korban Perang Dingin Soviet-AS yang Dirudal
Gegara Insiden "Mata-mata"
<https://www.kabarpemumpang.com/mengenang-korean-air-007-korban-perang-dingin-soviet-as-yang-dirudal-gegara-insiden-mata-mata/> diunduh Tanggal 20 Januari 23

Pengaruh Perang Dingin terhadap Perkembangan Teknologi Ruang Angkasa. HYPERLINK "<https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/03/180000479/pengaruh-perang-dingin-terhadap-perkembangan-teknologi-ruang-angkasa?page=all>"<https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/03/180000479/pengaruh-perang-dingin-terhadap-perkembangan-teknologi-ruang-angkasa?page=all>, diunduh Tanggal 2 Desember 2023 Perkembangan Persenjataan Nuklir pada Masa Perang Dingin.

Perseteruan Blok Barat dan Blok Timur, serta Negara-Negara Anggotanya. HYPERLINK "<https://www.gramedia.com/literasi/blok-barat-dan-blok-timur/>"<https://www.gramedia.com/literasi/blok-barat-dan-blok-timur/> diunduh Tanggal 1 Desember 2023

Pesawat Mata-mata AS Terbang di Atas Selat Taiwan, Militer China 'Siaga' HYPERLINK "<https://international.sindonews.com/read/1034957/40/pesawat-mata-mata-as-terbang-di-atas-selat-taiwan-militer-china-siaga-1677629033>"<https://international.sindonews.com/read/1034957/40/pesawat-mata-mata-as-terbang-di-atas-selat-taiwan-militer-china-siaga-1677629033> diunduh Tanggal 13 Nopember 2023

Pesawat Supersonik, Inovasi Penerbangan dalam Perlombaan Perang Dingin. HYPERLINK "<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/08/120000070/pesawat-supersonik-inovasi-penerbangan-dalam-perlombaan-perang-dingin?page=all>"<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/08/120000070/pesawat-supersonik-inovasi-penerbangan-dalam-perlombaan-perang-dingin?page=all> diunduh Tanggal 2 Desember 2023

Rekan Amerika saya: HYPERLINK "<https://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreagankal007disaster.htm>"<https://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreagankal007disaster.htm> diunduh Tanggal 2 Desember 2023

To Protest Downing" Aviation Week and Space Technology 19
September 1983, 26.

BAB 2

KEJAHATAN DALAM HUKUM UDARA INTERNASIONAL: KONVENSI TOKYO 1963, THE HAGUE 1970, MONTREAL 1971 DAN BIEJING 2010

**Ekky Widha Atmaka, Amd, SH
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.**

Dalam konvensi Tokyo 1963 dijelaskan latar belakang, berlakunya konvensi Tokyo 1963 termasuk ketertiban dan disiplin, dalam penerbangan (*in flight*), pelanggaran hukum nasional, tindakan membahayakan ketertiban dan disiplin, lingkup geografis, pengecualian berlakunya Konvensi Tokyo 1963, disiplin dalam pesawat udara; Dalam konvensi The Hague 1970 dijelaskan latar belakang, proses penyusunan konvensi The Hague 1970, berlakunya konvensi The Hague 1970 termasuk dalam penerbangan (*in flight*), pesawat udara negara (*state aircraft*), pendaratan di negara pendaftar pesawat udara, pengoperasian bersama secara internasional, membantu pelanggaran, percobaan tindakan melawan hukum, orang di dalam pesawat udara; Dalam konvensi Montreal 1971 dijelaskan penafsiran Konvensi Montreal 1971 termasuk istilah melawan hukum, dalam penerbangan (*in flight*), dalam pelayanan (*in services*); berlakunya konvensi Montreal 1971 termasuk pesawat udara negara (*states aircraft*), tindakan melawan hukum nasional, percobaan membantu tindakan melawan hukum, pengoperasian bersama secara internasional ; Dalam konvensi dan protokol Beijing 2010 dijelaskan diskusi Panel 3 April 2009, konferensi Diplomatik di Beijing tgl 10 September 2010, Sidang Majelis ke-37, pemberantasan tindakan melawan hukum, jenis ancaman baru, pelanggaran konvensi Beijing 2010 yang meliputi siapa yang melakukan pelanggaran, obyek pesawat udara sehingga tidak dapat beroperasi, orang yang menempatkan sesuatu sehingga

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono.,*Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbnagan*. Jakarta : Penerbit Gramata, 2011.
- Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono.,*Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbnagan*. Jakarta : Penerbit Gramata, 2011.
- Martono K.,Amad Sudiro.,*Hukum Udara Publik : Internasional dan Nasional, Edisi Revisi*.Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Divisi Perguruan Tinggi,2016, hal.190
- Martono K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*.Bandung : Penerbit Alumni,1987.
- Martono, K.,*Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Buku Kedua*.Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995.
- Shubber S., *Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. The Hague :* Martinus Nijhoff, 1973.

ARTIKEL

- A. Samuel, *The Legal Problems: An Introduction*.Vol.37 JALC 163 (1971).
- Evan A .E., *Air Hijacking: Its Cause and Cure*.Vol.63 *American Journal and International Law* 700 (1969).
- Fick R.I., Gordan J.I., and Patterson J.C., *Aircraft Hijacking: Criminals and Civil Aspects*”, University of California Law Review, Vol.22 (1969-1970) hal.83..
- Horvitz., *Arab Terrorism and International Aviation: Deterrence vs the Political Act*. Vol.24 *Chity’s Law Journal* 147(1976).

- Martono K., *Hukum Pembajakan Udara dan Riwayat Kejahatan itu Sepanjang Sejarah*, dalam Martono K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987, hal.23-32.
- Martono K., *Pembajakan Udara (Aircraft Hijacking)*. Pidato Ilmiah yang dibacakan pada Lustrum ke-VII, Universitas Islam Jakarta, 1987. Tidak diterbitkan
- Martono K., *Pemberantasan Teroris Internasional*, dalam Martono, K., *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua. Bandung : Penerbit Madar Maju, 1995, hal.161.
- Martono, Agus Pramono dan Eka Buditjahjono, *Aspek-Aspek Hukum Pembajakan Udara (Legal Aspect of Aircraft Hijacking)*, dalam Martono K, Agus Pramono dan Eka Budi Tjahjono., *Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta : Penerbit Gramata, 2011, hal.58.
- Milde M., *Nationality and Registration of Aircraft Operated by Joint Air Transport Operating Organization or International Operating Agencies* dalam Matte N.M., *Annals of Air and Space Law*, (1985) Vol. X. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd, 133-154.
- Patterson J.C., *Aircraft Hijacking Criminal and Civil Aspects*, Vol.22 *University of California Law Review* 83 (1969-1970).

DOKUMEN

- Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation of 2010, Adopted in Beijing, China on 10 September 2010
- Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Signed at Paris on 13 October 1919, teks Dempsey P. S. Ed, *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd, hal 19-51.

ICAO Doc 9518, *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, signed at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988.

ICAO Doc.7300/8, *Convention on International of Civil Aviation*, Signed at Chicago on 7 December 1944, untuk teksnya dapat dibaca pada Dempsey P. S. Ed, *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd, hal 19-51.

ICAO Doc.8364, *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*, Signed at Tokyo on 14 September 1963.

ICAO Doc.8920, *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, Signed at The Hague, on 16 December 1970; untuk Teks lihat Dempsey P.S. Ed. *Annals of Air and Space Law*, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd.2005,hal.185-193.

ICAO Doc.8966, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, Signed at Montreal, on 23 September 1971.

ICAO Doc.9571, *Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection*, signed at Montreal on 1 March 1991.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 , ditandatangani di Wina pada tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980.

JURNAL

Annals of Air and Space Law, (1985) Vol. X. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd,133- 154.

Annals of Air and Space Law, (2005), Vol. XXX-Part I. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd, 2005.

Meuner Case (1894) dan Lord Radiliffe dalam Schtrak Case (1964).
The Harvard Research on Extradition, Castioni Case (1891).
The University of California Law Review, Vol.22 (1969-1970) hal.83.
Vol.37 JALC 163 (1971).
Vol.63 *American Journal and International Law* 700 (1969).
Vol.22 *University of California Law Review* 83 (1969-1970).
Vol.24 *Chity's Law Journal* 147(1976).

LAIN-LAIN

Herman v. Trans World Airlines, 330 NYSD 2nd 829 (Sup.Ct. 1972)
<http://www.thefreedictionary.com/device>
<http://www.thefreedictionary.com/substance> diunduh Tanggal
26 September 2023
Japan Air Lines Penerbangan 472 (1977). https://id.wikipedia.org/wiki/Japan_Airlines_Penerbangan_472 diunduh
Tanggal 12 Agustus 2023
Konvensi Beijing tahun 2010 tentang pemberantasan tindakan
melanggar hukum yang berkaitan dengan penerbangan sipil
internasional – sebuah studi interpretatif. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC714905/> diunduh Tanggal 3
Agustus 2023
Pan Am Penerbangan 103. https://id.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Penerbangan_103 diunduh Tanggal 2
Agustus 2023
Peristiwa 9/11: Sejarah dan Kronologi Serangan di Amerika Serikat
[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6285098/
peristiwa-911-sejarah-dan-kronologi-serangan-di-amerika-
serikat](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6285098/peristiwa-911-sejarah-dan-kronologi-serangan-di-amerika-serikat) diunduh Tanggal 3 Agustus 2023
Pfug v. Egyptair , 961 F.2d. 26 (Akhir ke-2 1992).

BAB 3

HUKUM UDARA PERDATA NASIONAL: REGULASI DAN KASUS- KASUSNYA

C.Priaardanto Kantor Pengacara

Danto dan TOMI & Rekan: Injury Specialist Law Firm

In Association with HERMANN LAW GROUP www.hlg.lawyer
Seattle USA & Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Regulasi Hukum Udara Perdata Nasional

Ringkasan

Dalam sub bab A ini dibahas Ordonansi Stb.1939-100 yang meliputi tiket penumpang pesawat udara (*passenger ticket*), tiket bagasi tercatat (*baggage check*), surat muatan udara (*airwaybill*), konsep tanggung jawab hukum (*legal liability*), tanggung jawab hukum dalam Stb.1939-100, batas waktu tanggung jawab pengangkut, tanggung jawab dalam hal keterlambatan, cara menghitung santunan, yang berhak menerima santunan, jangka waktu melapor, sanksi, kelemahan, istilah-istilah dan sistem tanggung jawab; Undang-Undang No.33 Tahun 1964, Undang-Undang No.15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

1. Ordonansi Stb.1939-100

Ordonansi Stb.1939-100.¹ tentang Pengangkutan Udara terdiri dari 5 Bab dan 40 Pasal yang mengatur tanggung jawab hukum penerbangan nasional, yang berlaku sejak Konvensi Warsawa 1929 dalam tahun 1934 untuk

¹Stb.1939-100 tentang Peraturan Pengangkutan Udara (Luchtvervoer-Ordonantie), lihat teks Martono K., Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa. Bandung: Penerbit Alumni, 1987 hal.220-237

BAB 4

SUKU CADANG PALSU PESAWAT UDARA: (*BOGUS PARTS OF AIRCRAFT*)

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.
Elfi Amir, SSiT., SE., MM

Di Perusahaan penerbangan di Inggris, AS, Brazilia, menemukan suku cadang palsu yang dipasok oleh AOG Technics Ltd di London. Menurut CAA Inggris, bilamana suku cadang palsu atau rusak tersebut terlanjur dipasang harus segera diganti. Dalam hubungan ini perusahaan penerbangan *Ryanair* tidak pernah berhubungan langsung dengan perusahaan AOG Teknis London, biasanya melalui perantara pihak ketiga. Masalah suku cadang palsu di Inggris sudah gugatan di pengadilan.

AOG Technics Ltd., menyediakan suku cadang yang dipakai oleh *Airbus SE A320, Boeing Co. 737 generasi tua*. Menurut EASA *Authorised Release Certificates (ARC)* suku cadang yang disediakan AOG Technics Ltd., dipalsukan. Pesawat udara jenis Airbus A320 neo dan Boeing 737 Max juga menggunakan suku cadang yang mengkhawatirkan, sementara itu bengkel pesawat udara kekurangan tenaga terampil, sedangkan kebutuhan bengkel semakin meningkat. Suku cadang palsu menjadi kontraversi antar perusahaan penerbangan, bengkel, vendor maupun regulator, masyarakat, maupun pasar dan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, dll. Berdasarkan temuan tersebut artikel ini bermaksud menguraikan dari perspektif hukum sebagai berikut:

BAB 5

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT DENGAN DRONE SECARA KOMERSIAL DI INDONESIA¹ (LEGAL LIABILITY OF CARRIAGE USING DRONE FOR COMMERCIAL IN INDONESIA)

Saptandri Widiyanto, S.H., DESS., DESM. &
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Pendahuluan

Kendaraan udara tidak berawak (*unmanned aerial vehicles-UAV*)¹ atau *remotely piloted aircraft (RPA)*,² selanjutnya disebut drone³ adalah kendaraan udara yang dikemudikan orang dari jarak jauh atau dikemudikan oleh fasilitas komputer di dalam kendaraan tersebut. Drone pernah digunakan pada pertunjukan pembukaan Asian Games di Jakarta 2018 lalu. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lainnya seperti: hobi, *aeromodeling*,⁴ pemotretan, pembuatan film, pemetaan

¹ ICAO's circular 328 AN/190: *Unmanned Aircraft Systems*" (PDF). ICAO. Retrieved 3 February 2016.

² Aastha Khurana., Regulation of Drones in India 21 Jul 2020 <https://www.latestlaws.com/articles/regulation-of-drones-in-india/>, diakses tanggal 30 Nopember 2020

³ David Hodgkinson and Rebecca Johnson., *Aviation Law and Drone: Unmanned Aircraft and the Future of Aviation*. London and New York: Routledge, Taylor& Francis Group, 2018, page 2.; Masyitha Salsabila, The State's Responsibility for The Use of UAV/drones in Airspace, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret E-mail: salsachaca99@gmail.com

⁴ Akhdi Martin Pratama., Kemenhub: Di 2018, Ada 4 Kasus Drone yang Masuk ke Bandara. <https://money.kompas.com/read/2019/07/17/130245126/kemenhub-di-2018-ada-4-kasus-drone-yang-masuk-ke-bandara>. Diakses tanggal 28 Nopember 2020.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Carl Q. Christol., *The Modern International Law of Outer Space*. New York, Oxord: Pergamon Press. Toronto, Canada: Sydney Paris, Frankfurt, 1982.
- David Hodgkinson and Rebecca Johnson., *Aviation Law and Drone: Unmanned Aircraft and the Future of Aviation*. London and New York: Routledge, Taylor& Francis Group, 2018.
- Endang Saefullah Wiradipradja., *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Transportasi Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty-1982.
- Hadi Setia Tunggal., *Undang-Undang Penerbangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta ; Penerbit Harvarindo, 2007.
- Martono K., Amad Sudiro, *Hukum Udara Perdata Nasional dan International*. Jakarta : Penerbit Rajagrafindo Persada Divisi Perguruan Tinggi.
- Masyitha Salsabila, *The State's Responsibility for The Use of UAV/drones in Airspace*, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret; E-mail: salsachaca99@gmail.com.
- Matte N.M., *Aerospace Law: From Scientific Exploration to Commercial Utilization*. Toronto, Canada: The Carswell Company Ltd.
- Mieke Komarkantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Tata Ruang*. Bandung: Madar Maju, 1994, hal.118-129.
- Priyatna Abdurasjid, *Hukum Antariksa Nasional*. Jakarta: Rajawali: 1987.

ARTIKEL

- A master and servants are considered to be one person for the purpose of liability*. Ram.S.Jakhu, *Julius Young Jewelry M.E.G.,Co.,Inc.,vs Delta Airlines* dalam Matte N.M.,Ed., *Annals of Air and Space Law*. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd.1979.

Brad Kizza, *Liability of Air Carrier for Injuries to Passenger Resulting from Damages Hijacking and Related to Incidents*” Vol.469 10 JALC 151 (1980).

Carl Q. Christol, *International Liability for Damage Caused by Space Objects: The 1972 Liability for Damage Convention*, dalam Carl Q. Christol., *The Modern International Law of Outer Space*. New York, Oxord: Pergamon Press. Toronto, Canada: Sydney Paris, Frankfurt, 1982.

Col.Agung Sasongkojati M.A.,Sc.,M.S.S.,*Drone Operation & National Defense*. Submitted to the International Webinar on Regulations and Challenges in Drones Operation, conducted by the Ministry of Transportation on 17 December 2020.

Gerald G.F.F.*Protocol to Amend the Convention for Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface* (Rome 1952), dalam Matte N.M.,Ed.,*Annals of Air and Space Law, Vol.IV-1979*) 11-28 (1979).

Gorove S.,*Liability in the Space Law : An Overview*.in Matte N.M.,*Annals of Air and Space Law, Vol.VIII-1983*. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd 373-380.

Indrojono Soesilo, PhD., *Prospect and Challenges of Drone Applications in Indosia*, Submitted to the International Webinar on Regulations and Challenges in Drones Operation, conducted by the Ministry of Transportation on 17 December 2020.

Rene H.Mankiewicz.,*The Protocol of Guatemala City of 1971 to Further Amend the Warsaw Convention*. Vol.38 JALC 519-545 (1972).

William J. Hackey Jr., *Breaking the Limit Liability for Wilful Misconduct Under Guatemala City Protocol*,Vol.42(3) JALC 607 (1976).

DOKUMEN

24UST; 2389;TIAS 7762;961 UTS 187,*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, opened for signature at London,Moscow and Washington, on 29 March 1972.

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw 12 October 1929.

ICAO 8932, *Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the International carriage by Air*, Signed at Warsaw on 12 October 1929, as Amended by the Protocol done at The Hague on 28 September 1955, Signed at Guatemala City. On 8 March 1971.

ICAO Doc. 7364, *Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on The Surface*, Signed at Rome on 7 October 1952.

ICAO's circular 328 AN/190: *Unmanned Aircraft Systems*" (PDF). ICAO. Retrieved 3 February 2016.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011.

Montreal Agreement of 1966.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995.

Protokol The Hague 1955.

Stb.1939-100.

Undang-undang tentang Penerbangan (UURI No.15 Tahun 1992), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UURI No.8 Tahun 1999), Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 42Tahun 1999.

JURNAL

Dempsey P.S.Ed., *Annals of Air and Space Law* (2005) Vol.XXX-Part I. Toronto: The Carswell Compasny Ltd.

Matte N.M., *Aerospace Law*, London: Sweet & Maxwell Ltd (1969), Toronto , Canada : The Carswell Company, Ltd337-350.

Matte N.M.,Ed.,*Annals of Air and Space Law*. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd.1979.

Milde M., *Annals of Air and Space Law*, Vol.XVIII-1993. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd., hal. 653-670.

Vol.38 JALC 519-545 (1972).

Vol.42(3) JALC 607 (1976).

Vol.469 10 JALC 151 (1980)

LAIN-LAIN

Aastha Khurana., Regulation of Drones in India 21 Jul 2020
<https://www.latestlaws.com/articles/regulation-of-drones-in-india/>, diakses tanggal 30 Nopember 2020.

Akhdi Martin Pratama., *Kemenhub: Di 2018, Ada 4 Kasus Drone yang Masuk ke Bandara.* <https://money.kompas.com/read/2019/07/17/130245126/kemenhub-di-2018-ada-4-kasus-drone-yang-masuk-ke-bandara>. Diakses tanggal 28 Nopember 2020.

AS vs Iran, Teheran Siapkan Drone Tempur Berjarak 1.500 Km.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200418191727-4-152904/as-vs-iran-teheran-siapkan-drone-tempur-berjarak-1500-km> Drone Iran, diakses tanggal 30 Nopember 2020

Drone Laws in Singapore.
<http://www.straitstimes.com/singapore/singapore-to-introduce-drone-law-5-things-about-these-flying-machines>, 19 April 2016, diakses tanggal 30 Nopember 2020

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/98/1169159/seberapa-siap-angkut-kargo-pakai-drone-ini-pandangan-konsultan-logistik>

<https://riau.antaranews.com/berita/140496/begini-cara-ptpn-v-manfaatkan-teknologi-drone-untuk-petakan-perkebunan-sawit>

<https://tekno.kompas.com/read/2016/04/18/09185527/Kekhawatiran.Pesawat.Komersial.Tabrak.Drone.Akhirnya.Terjadi?page=all>

Kecelakaan penerbangan pertama akibat drone dilaporkan terjadi di AS <https://www.merdeka.com/teknologi/kecelakaan-penerbangan-pertama-akibat-drone-dilaporkan-terjadi-di-as.html>

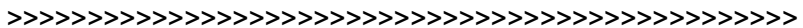
Kecelakaan penyambung kabel tegangan tinggi (SUTET) di Desa Kedunwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

<https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://www.clakclik.com/72-peristiwa/1506-drone-proyek-sutet-pln-di-kedungwinong-jatuh-timpa-kandang-ayam-warga&prev=search&pto=aue>, accessed on 14 December 2020.

Kelsey D.Atherton., Can drone swarms help the Air Force fight wildfires?, di California Amerika Serikat drone digunakan untuk SAR, <https://www.c4isrnet.com/unmanned/2019/02/08/air-force-and-uk-want-drone-swarms-to-fight-wildfires/>, diakses tgl 30 November 2020

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.G/2007/PN Jak./Sel tanggal 5 Februari 2008 yang dimuat dalam Martono K., Agus Pramono., Hukum Udara Perdata : Nasional dan Internasional. Jakarta : Penerbit Rajagrafindo Persada Devisi Perguruan Tinggi, 2013, 49-62.

Navigasi pos Jawahir Gustav Rizal, Drone Dipakai untuk Kirim APD dan Logistik Covid-19 di Skotlandia, Ini Alasannya.<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/30/090000165/drone-dipakai-untuk-kirim-apd-dan-logistik-covid-19-di-skotlandia-ini?page=all>, diakses tanggal 28 November 2020.



LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

Tentang

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DENGAN DRONE KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara.
- c. bahwa transportasi drone merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, murah, sederhana, mudah dikendalikan, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi dan perannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola transportasi nasional yang mantap dan dinamis;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT DENGAN DRONE SECARA
KOMERSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengangkutan kargo yang dilakukan dengan drone dengan sewa atau bayaran adalah pengangkutan dengan menggunakan wahana drone yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan badan hukum Indonesia telah memperoleh ijin melakukan kegiatan pengangkutan.
2. Istilah “pengangkutan drone” dalam Undang-Undang ini adalah setiap pengangkutan yang, sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan berada di wilayah Republik Indonesia atau pengangkutan dalam negeri.
3. Pengangkutan yang dilakukan oleh beberapa pengangkut dengan drone, untuk kepentingan Undang-Undang ini, dianggap satu pengangkutan yang tidak dapat dipisahkan, bilamana oleh yang bersangkutan dianggap sebagai satu pengoperasian, apakah hal itu disetujui dalam bentuk satu kontrak atau beberapa kontrak secara berturut-turut, dan hal itu tidak mengurangi artinya hanya karena satu kontrak atau beberapa secara berturut-turut (seri), tidak mengurangi sifat

BAB 6

TINJAU ULANG UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Ekky Widha Atmaka, Amd, SH
Saptandri Widiyanto, S.H., DESS., DESM. &
Elfi Amir, SSiT., SE., MM
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi

1. Pendahuluan

Keselamatan transportasi sangat memprihatinkan. Dalam tahun 2003 kecelakaan transportasi darat meningkat dari 58 kali menjadi 100 kali dalam tahun 2004. Kecelakaan transportasi laut bukan berarti tidak ada, mungkin karena tidak terekspose oleh mass media, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam tahun 2007 lebih parah lagi, naik keretapi tabrakan, naik kapal laut tenggelam dan naik pesawat udara jatuh. Kecelakaan pesawat udara diawali oleh *Lion Air* pesawat udara jenis MD-82 nomor penerbangan JT538 dalam penerbangan dari Jakarta ke Solo pada tanggal 30 Nopember 2004, terakhir kecelakaan pesawat udara *Adam Air* bulan Januari 2007 dan Garuda Indonesia dalam bulan Maret 2007. Secara kuantitatif jumlah kecelakaan penerbangan relatif lebih kecil dibandingkan dengan kecelakaan transportasi darat, namun demikian kecelakaan pesawat udara selalu menjadi perhatian masyarakat.¹

¹ Martono K., Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009, Bagian Pertama > Bandung: Penerbit CV Madar Maju, hal.420

BAB 7

KARYAWAN KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP: PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA PENERBANGAN DAN LAINNYA

Elfi Amir, SSiT., SE., MM
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Latar Belakang

Terdapat keluhan dari tenaga penerbangan yang meminta pembelaan dan perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak kerja maupun pegawai tetap karena mereka sudah bekerja lebih dari 5 tahun, tetapi tidak ada pesangon yang memadai bahkan ada yang tidak ada pesangon dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pihak karyawan kontrak dalam posisi yang kalah terus dibandingkan dengan posisi perusahaan di mana mereka bekerja. Mereka adalah karyawan lulusan pendidikan tahun 1992, minta perlindungan kerja yang jelas.

B. Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Menurut Pasal 54 UU 13/2003, Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh dan jabatan atau jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja dan/atau buruh. Bilamana dilihat dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama, maka jelas sekali bahwa PKWT paling lama adalah 3 (tiga) tahun, tetapi dapat

BAB 8

PERAN GENDER: GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL

Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

A. Tinjauan Umum

Dalam point tinjauan umum mengenai gender dijelaskan pengertian; dasar hukum internasional dan nasional; sejarah perkembangan gender termasuk lahirnya istilah feminisme, kesetaraan, diskriminasi berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, tataran nasional, hak-hak wanita dan berbagai perlindungan hak-hak asasi wanita, kekerasan berbagai alasan berbasis gender, seksual, identitas, tempat kerja, kesetaraan dalam POLR dan industri pariwisata sebagai berikut:

1. Pengertian

Gender dari perspektif hak-hak asasi manusia (HAM) adalah suatu kemerdekaan, kebebasan, dan perlindungan paling mendasar bagi setiap manusia, bersifat lintas pemerintahan dan agama, tidak berbeda baik saat perang maupun damai, serta bersifat tetap.¹ Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan gender adalah perjuangan perlakuan wanita setara pria (gender) yang dilindungi oleh Konvensi Internasional dan/atau hukum nasional negara berdaulat.

¹ Resume Tentang Hak Asasi (HAM) dan Gender
<https://www.tribundesatimes.com/2015/12/resume-tentang-hak-asasi-ham-dan-gender.html> diunduh Tanggal 14 Juli 2022

TENTANG EDITOR



Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M., Mc.Sc., CLA.

Lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939, lulus di Akademi Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang (1959), Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Indonesia (1971), Universitas Mc Gill, Montreal Kanada (LLM – 1980), Doktor Ilmu Hukum (Dr) UNDIP (2006), Sertifikat Mediator Mahkamah Agung (Mc.Sc), Sertifikat Legal Audit (PKB). Saat ini, beliau adalah Guru Besar Nasional dan Internasional Hukum Udara di Universitas Tarumanegara.

Narasumber yang membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan. Sampai saat ini sudah 27 kasus yang ditangani. Pembicara pada seminar luar negeri seperti di China, India dan seminar nasional di dalam negeri. Menyelenggarakan Konferensi Internasional Pasca Covid-19 dan Paradigma Penerbangan: Global, Regional dan Nasional.

Prof. Martono menerbitkan 18 buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan 28 artikel diterbitkan www.ijbmi.org, www.asianacademicresearch.org, www.iosjournals.org; www.ijhassi.org; <https://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp>; Annals of Air and Space Law (XXX-VIII, Ann. Air & Sp. L at 55-89); Sejarah Hukum Udara dan Antariksa (2014) Vol. XXXIX Ann Air & SP L di 163-212; Jurnal Sinta 2; penghargaan ke-23, World Top 100 Law/ Law and Legal Studies Scientists 2022 [https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+ %2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=](https://www.adscientificindex.com/top-100-scientist/?tit=Law+%2F+Law+and+Legal+Studies&con=&country_code=id&subject=)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202457767, 1 Juli 2024

Pencipta
Nama : **Columbanus Priardanto, Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H. dkk**
Alamat : Citra 1 Blok C-5/14 Rt/Rw 003/016 Kalideres, Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Columbanus Priardanto, Ekky Widha Atmaka, Amd., S.H. dkk**
Alamat : Citra 1 Blok C-5/14 Rt/Rw 003/016 Kalideres, Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Bunga Rampai Hukum Udara**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Juni 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000633129

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

1.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.